

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan dambaan bagi setiap warga negara. Dalam Haryadi (2015), disebutkan oleh Charles E. Miriam bahwa fungsi negara yaitu keamanan ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahteraan umum dan kebebasan. Teori Sosialisme juga menjelaskan bahwa aktivitas negara ditujukan pada pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Sejalan dengan teori tersebut, terdapat konsep *welfare state* (negara kesejahteraan) yang didefinisikan sebagai gagasan negara mengenai sistem pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab pada kesejahteraan rakyatnya. Konsep *welfare state* dianut oleh suatu negara yang memiliki kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, dan *problem solving* bangsa (Hadiyono, 2020). Salah satu negara yang menganut konsep *welfare state* adalah Indonesia (Riwanto & Gumbira, 2017).

Konsep *welfare state* yang dianut oleh Indonesia ditunjukkan pada tujuan negara Indonesia yang dapat dijumpai pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 alinea keempat, yang berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Sejalan dengan bunyi alinea keempat UUD 1945 tersebut, kesejahteraan dapat dicapai dengan peningkatan dan pemberdayaan ekonomi. Pendapat tersebut didukung oleh Aravacik (2019) yang menyatakan “*all of the definitions regarding welfare state include the mentality to*

protect those who have poor economic and social conditions”, artinya negara kesejahteraan mencakup mentalitas untuk melindungi rakyatnya yang memiliki kondisi ekonomi dan sosial yang buruk.

Meskipun menganut konsep *welfare state*, Indonesia termasuk dalam kategori tingkat kesejahteraan yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan data dari *The Legatum Prosperity Index*. Definisi *The Legatum Prosperity Index* adalah suatu peringkat tahunan yang dikembangkan oleh Institut Legatum dengan 12 pilar kesejahteraan, diantaranya adalah *safety and security, personal freedom, governance, social-capital, investment environment, enterprise conditions, market access and infrastructure, economic quality, living conditions, health, education, natural environment* (Legatum Institute, 2020). Dengan adanya *The Legatum Prosperity Index* ini, kekuatan dan kelemahan dari negara-negara di seluruh dunia dapat dilihat dan dimanfaatkan oleh suatu negara tersebut untuk merumuskan rencana strategis dengan harapan agar lebih membangun masyarakat inklusif, ekonomi terbuka serta masyarakat yang berdaya sebagai upaya peningkatan kesejahteraan. Berikut peringkat Indonesia berdasarkan 12 pilar yang telah disebutkan diatas yang dimuat dalam laporan *The Legatum Prosperity Index* pada tahun 2020.

Gambar 1.1 *The Legatum Prosperity Index* Tahun 2020

The Legatum Prosperity Index™ Ranks 57–112

2010 rank	2019 rank	2020 rank	Country	Safety and Security	Personal Freedom	Governance	Social Capital	Investment Environment	Enterprise Conditions	Market Access and Infrastructure	Economic Quality	Living Conditions	Health	Education	Natural Environment
75	61	57	Indonesia	77	100	58	6	62	57	70	58	104	97	88	68
55	55	59	Kuwait	83	116	98	33	73	63	37	41	33	34	78	129
57	59	60	North Macedonia	60	79	65	121	58	72	68	79	50	61	86	66
55	59	60	Trinidad and Tobago	82	39	61	86	87	118	62	62	33	74	69	114
63	57	61	Peru	90	50	69	150	68	67	74	61	99	53	65	26
80	66	62	Kazakhstan	81	131	83	29	59	76	80	55	54	72	37	104
59	56	63	Argentina	78	27	56	122	82	126	89	137	64	46	50	50
54	65	64	Thailand	127	118	99	23	54	70	53	33	72	35	74	119
62	67	65	Jamaica	124	32	53	108	67	58	75	104	67	50	81	142
58	62	66	Oman	40	150	92	34	61	50	48	81	65	60	79	147
67	64	67	Albania	70	78	70	146	77	80	59	105	82	77	54	56
60	68	68	Mexico	146	64	86	101	63	64	47	40	85	55	72	72
79	70	69	Belarus	69	134	114	120	91	89	71	52	42	79	30	82
56	69	70	Brazil	115	48	68	119	73	121	91	89	62	63	91	12
83	72	71	Saudi Arabia	107	161	93	43	66	38	44	54	59	65	63	134
76	76	72	Dominican Republic	119	45	88	60	81	93	66	68	86	73	96	51
90	81	73	Vietnam	97	136	104	13	108	75	60	56	88	49	68	96
77	71	74	Colombia	153	69	71	102	71	90	67	72	83	36	76	28
71	74	75	Cabo Verde	43	34	45	56	113	94	117	115	102	85	98	57
84	75	76	Russia	140	143	101	99	78	87	61	43	58	101	21	77
74	73	77	Bosnia and Herzegovina	48	87	112	76	84	146	82	77	47	88	70	111
95	91	78	Azerbaijan	89	148	110	68	50	39	78	83	68	57	73	136
87	78	79	Paraguay	72	75	94	62	85	135	97	74	76	84	106	27
96	83	80	Moldova	75	95	81	125	80	102	72	101	80	98	59	140
66	79	81	Suriname	59	52	100	58	147	111	87	94	77	107	102	14
72	80	82	Botswana	76	58	43	103	72	79	101	50	111	122	100	132
85	82	83	Philippines	149	76	79	31	79	78	73	45	112	102	84	73
98	77	84	Sri Lanka	130	80	76	33	104	62	93	112	109	47	66	60
97	88	85	Mongolia	62	65	64	52	101	103	118	95	105	100	56	116
68	86	86	Jordan	88	121	72	106	52	49	76	128	63	80	97	151
70	84	87	South Africa	138	38	48	59	69	60	83	69	107	130	108	146
81	87	88	Namibia	58	49	44	84	83	71	96	110	117	125	118	69
101	85	89	Ecuador	79	70	108	138	96	130	86	126	93	67	75	43
102	89	90	Kyrgyzstan	71	103	98	66	94	116	112	92	90	76	80	65
93	90	91	Guyana	91	62	74	77	97	109	103	109	84	119	93	54
89	96	92	Ukraine	144	85	73	147	119	74	77	91	69	115	38	110
82	100	93	El Salvador	128	66	75	91	89	92	81	90	94	93	109	153
73	92	94	Turkey	147	154	118	141	57	59	54	70	52	70	89	97
86	93	95	Belize	80	56	95	135	128	123	94	119	87	91	99	49
100	94	96	Morocco	68	119	91	164	65	61	58	97	95	103	113	126
109	102	97	Uzbekistan	52	147	136	20	90	124	105	78	98	43	85	157
99	101	98	São Tomé and Príncipe	46	43	78	94	132	110	110	98	116	105	114	74
69	95	99	Tunisia	125	99	66	163	95	101	90	103	78	94	95	143
94	97	100	Ghana	96	53	59	73	118	69	113	132	115	121	105	100
110	98	101	India	139	106	49	78	74	47	85	73	122	113	115	162
92	99	102	Guatemala	121	89	117	83	92	99	84	75	114	99	121	92
91	105	103	Cuba	100	153	137	36	120	159	108	96	81	28	42	95
108	103	104	Rwanda	123	114	50	63	39	45	100	80	150	110	128	112
88	104	105	Lebanon	136	112	119	152	98	88	92	147	57	92	62	120
106	106	106	Bolivia	86	83	130	151	110	150	111	121	101	108	94	34
103	107	107	Honduras	129	102	133	71	93	113	95	93	110	90	120	80
107	108	108	Algeria	53	142	115	129	134	132	102	134	71	83	82	152
105	113	109	Turkmenistan	64	162	155	14	122	149	121	71	74	58	83	150
113	111	110	Senegal	109	59	63	48	107	85	116	123	121	123	147	83
104	109	111	Nicaragua	110	113	145	70	105	141	98	114	106	78	117	48
120	110	112	Tajikistan	83	151	139	24	117	105	128	133	100	71	90	131

Sumber : Legatum Institute (2020)

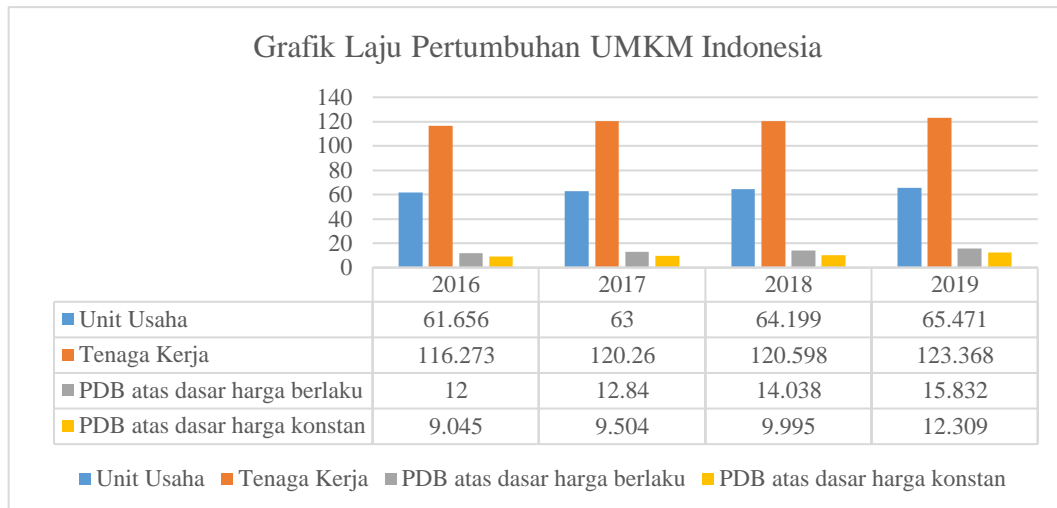
Berdasarkan gambar di atas, Indonesia berada di peringkat ke-77 pada *safety and security*, ke-100 pada *personal freedom*, ke-58 pada *governance*, ke-6 pada *social-capital*, ke-62 *investment environment*, ke-57 pada *enterprise conditions*, ke-70 pada *market access and infrastructure*, ke-58 pada *economic quality*, ke-104 pada *living conditions*, ke-97 pada *health*, ke-88 pada *education*, dan ke-68 pada *natural environment*. Terfokus pada pilar *economic quality* (kualitas ekonomi), Indonesia mendapat peringkat yang rendah. Meskipun masih jauh ada negara-negara dibawahnya, namun ini tidak praktis jika Indonesia sudah disebut negara yang sejahtera. Bagi Indonesia, semua masih sebatas cita-cita.

Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, perwujudan peningkatan kesejahteraan masyarakat dirumuskan oleh Pemerintah Indonesia melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau dapat disingkat menjadi UMKM. Dalam pemulihan dari kontraksi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, UMKM lah yang memainkan peran lebih sentral. Menurut *Asian Development Bank* (2020), UMKM adalah tulang punggung perekonomian Asia. Pernyataan tersebut dikarenakan UMKM dapat menjadi pendorong permintaan domestik, penciptaan lapangan kerja, berinovasi dan bersaing secara nasional dan berpotensi secara regional. Kunci pertumbuhan inklusif di negara berkembang Asia didorong oleh pengembangan UMKM dengan desain kebijakan UMKM yang semakin menantang karena kompleksitas iklim usaha UMKM dan kondisi eksternal yang berubah dengan cepat.

Secara umum, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah satu dari bentuk kegiatan dalam bidang kewirausahaan yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM dapat berguna sebagai ajang dan peluang yang baik dalam penciptaan lapangan pekerjaan yang direncanakan baik oleh pemerintah, swasta dan pelakunya usaha perorangan (Halim, 2020). *Asian Development Bank* (2020) mendefinisikan UMKM sebagai suatu badan produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan atau unit usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimum, tidak termasuk tanah dan bangunan, sebesar 10 miliar rupiah, atau dengan penjualan tahunan maksimum 50 miliar rupiah. UMKM juga diatur dalam dasar hukum yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang selanjutnya diperbaharui menjadi Peraturan Presiden (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (Sumampouw et al., 2021).

Sejalan dengan perwujudan pemberdayaan ekonomi, dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia bahwa UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari indikator unit usaha, tenaga kerja hingga Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan sebagai penilaian prestasi perekonomian suatu negara (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021). Dalam hal ini, indikator-indikator tersebut dapat memengaruhi laju pertumbuhan UMKM Indonesia sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan UMKM Indonesia



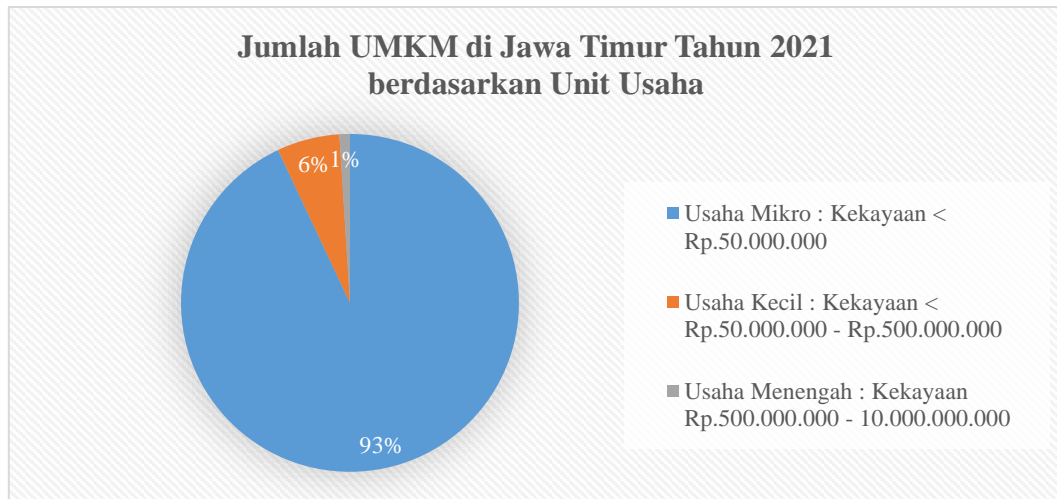
Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2021)

Berdasarkan grafik di atas, pertumbuhan UMKM di Indonesia ditunjukkan dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami peningkatan. Dari indikator unit usaha, jumlah UMKM mencapai 61,656 juta pada tahun 2016 hingga 65,471 juta di tahun 2019. Seirama dengan indikator tenaga kerja yang semula di tahun 2016 hanya 116,273 orang hingga mencapai 123,368 orang pada tahun 2019. Begitu juga PDB atas dasar harga berlaku dari 12 miliar pada tahun 2016, namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2019 mencapai 15,832 miliar. Kemudian diikuti oleh PDB atas dasar harga konstan dari 9,045 miliar pada tahun 2016, namun tiga tahun berikutnya yaitu pada tahun 2019 dapat mencapai 12,309 miliar. Pada penelitian Roswita Hafni dan Ahmad Rozali dipaparkan bahwa semakin bertambahnya tahun maka laju pertumbuhan UMKM juga akan semakin meningkat (Hafni & Rozali, 2017). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa banyak manfaat yang dimiliki oleh UMKM, baik dari kaca internasional maupun nasional.

Berbicara dari kaca internasional, Tambunan dalam Rayyan (2021) menyatakan bahwa UMKM tengah menjadi sorotan dunia. Seperti negara Belanda yang mengembangkan UMKM hingga mencapai 95% dari daftar jumlah unit usaha. Selain itu, terdapat UMKM yang dikembangkan Amerika Serikat telah mencapai 99% dari jumlah unit usaha. Amerika Serikat juga merasa bahwa UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap sektor perekonomiannya. Hal tersebut merupakan pencapaian yang luar biasa dari adanya UMKM.

Sedangkan, dari kaca nasional berpacu pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tahun 2020-2024. Pengembangan UMKM ditujukan sebagai penguat ketahanan ekonomi dalam rangka menstimulasi *value-added*, daya saing, kesempatan usaha, eskalasi keterampilan melalui UMKM. Oleh karena itu, meninjau bahwa UMKM ini sangat berdampak pada perekonomian, maka UMKM juga dikembangkan oleh salah satu provinsi di Indonesia yaitu Jawa Timur. Seiring dengan perkembangan UMKM di Jawa Timur, pada tahun 2021, UMKM menembus hingga 3.447.520 unit usaha yang tersebar di seluruh daerah di Jawa Timur menurut Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur, yang dapat dilihat pada skala berikut.

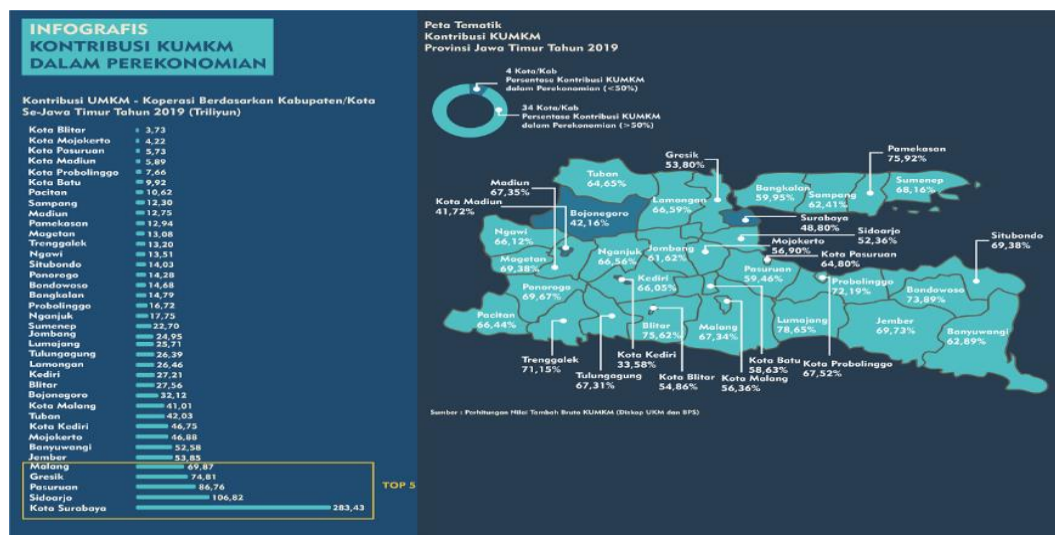
Grafik 1.2 Jumlah UMKM di Jawa Timur Tahun 2021 berdasarkan Unit Usaha



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur (2021)

Berdasarkan grafik di atas, Usaha Mikro berada di posisi terbanyak dengan persentase 93% dari total 3.447.520, sehingga didapatkan hasil 3.206.193,6 unit usaha. Kemudian posisi terbanyak berikutnya diikuti oleh Usaha Kecil dengan persentase 6% yang berjumlah 206.851,2 unit usaha. Posisi terendah didapatkan Usaha Menengah dengan persentase hanya 1% yang berjumlah 34.475,2 unit usaha. Unikny dari total UMKM tersebut, terdapat salah satu daerah yang dicanangkan sebagai “kota UMKM Indonesia” dan menyandang predikat TOP 5 (*five*) se-Jawa Timur karena UMKM nya memberikan kontribusi sebanyak 106,82 triliun pada tahun 2019 menurut Data Infografis Kontribusi KUMKM dalam perekonomian se-Jawa Timur yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Gambar 1.2 Data Infografis Kontribusi KUMKM dalam Perekonomian berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur



Sumber : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Jawa Timur (2021)

Berdasarkan gambar di atas, pada tahun 2019, kontribusi UMKM terbanyak diraih oleh Ibu Kota Jawa Timur sendiri yaitu Kota Surabaya dengan perolehan 283,43 triliun. Kemudian, Sidoarjo meraih peringkat kedua dengan akumulasi 106,82 triliun. Disusul oleh Pasuruan yang memperoleh 86,76 triliun. Selanjutnya ada Gresik yang meraih total 74,81 triliun. Top *five* terakhir didapatkan Malang dengan total 69,87 triliun.

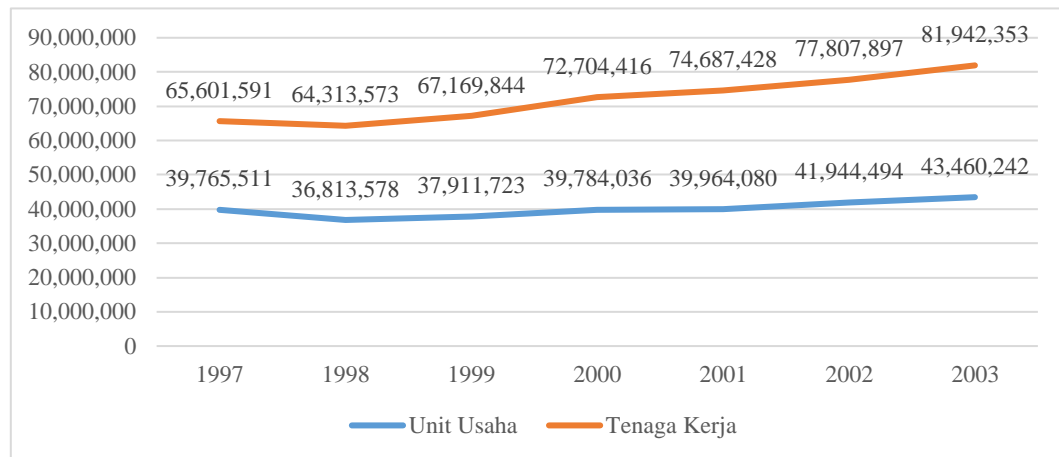
Dengan pencapaiannya mendapat peringkat kedua, Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan sebagai penyangga ibukota Provinsi Jawa Timur karena lokasinya yang berdekatan dengan Kota Surabaya. Letaknya juga cukup strategis untuk menjadi suatu daerah yang mengalami perkembangan pesat (Sidoarjokab.go.id, 2018). Bahkan, Sidoarjo memperoleh penghargaan Natamukti yang diserahkan oleh *International Indonesia Council for Small Business* (ICSB) pada puncak penganugerahan Gebyar UMKM Indonesia pada tahun 2018. Penghargaan Natamukti ini merupakan bentuk apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang dianggap

berhasil mengembangkan UMKM pada masing-masing daerahnya (KOMINFO Sidoarjo, 2018). Karena besarnya jumlah UMKM tersebut, Sidoarjo dijuluki sebagai “kota UMKM Indonesia” (Suprayitno, 2018).

Di tengah perkembangan pesat UMKM, dunia dihebohkan oleh datangnya wabah virus COVID-19 yang diidentifikasi muncul pertama kali di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 (Setiati & Azwar, 2020). Kemudian, Indonesia dinyatakan secara resmi oleh pemerintah terjangkit virus COVID-19 untuk kali pertama pada tanggal 2 Maret 2020 (Nursofwa et al., 2020). Keadaan ini tentu menyerang berbagai tatanan kehidupan, tidak hanya dari sektor kesehatan, namun juga sektor pendidikan, sosial, politik serta ekonomi sehingga permasalahan yang kompleks ini diklaim WHO (*World Health Organization*) sebagai pandemi global atau biasa disebut pandemi COVID-19 (Amrynudin & Katharina, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya pandemi COVID-19 ini sangat berakibat pada UMKM yang ikut melemah dan tergoyahkan (Prajanti et al., 2021).

Pada hakikatnya, UMKM memiliki kekuatan dari segi ketahanan ekonominya, karena ketika mengilas balik peristiwa krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, itu awal mula dari krisis nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter hingga menyebabkan resesi ekonomi (Suci, 2017). Resesi ekonomi dimaknai sebagai penurunan pada situasi perekonomian dalam jangka waktu lebih dari dua kuartal (Faujik, 2020). Saat Indonesia diterpa resesi ekonomi dari tahun 1997 hingga 1998, hanya UMKM lah yang dapat bertahan dan teruji masih mampu berdiri (Gunartin, 2017). Hal ini dibuktikan dengan data perkembangan UMKM periode 1997-2003 menurut Badan Pusat Statistik sebagaimana grafik berikut.

Grafik 1.3 Data Perkembangan UMKM Periode 1997-2003



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia (2016)

Berdasarkan grafik di atas, data yang dirilis Badan Pusat Statistik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi penurunan dimasa krisis yaitu pada tahun 1997-1998 dari 39,76 ribu menjadi 36,81 ribu yang ditinjau pada indikator unit usahanya, sedangkan dari indikator tenaga kerja dari 65,60 ribu menjadi 64,31 ribu. Namun, jumlah UMKM pasca krisis tidak berkurang, justru semakin meningkat setiap tahunnya. Seperti pada tahun 1999 ke tahun 2000 mengalami peningkatan dari total unit usahanya 37,91 ribu menjadi 39,78 ribu, kemudian naik lagi di tahun 2001 sebanyak 39,96 ribu, dan seterusnya. Begitu juga pada indikator tenaga kerja, pada tahun 1999 dari 67,16 ribu orang, namun di tahun 2000 mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 72,70 ribu orang, dan naik lagi di tahun 2001 menjadi 74,68 orang. Dengan demikian, fenomena diatas dapat menunjukkan bahwa UMKM berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian suatu negara.

Namun, berbeda dari krisis 1997-1998 tersebut, peningkatan penularan yang disebabkan oleh COVID-19 pada suatu populasi di daerah tertentu dapat dikatakan

sangat cepat. Akibat dari penyebaran krisis kesehatan yang terjadi, berbagai negara harus mengubah rencana-rencana strategis yang sudah diatur yang kemudian dimodifikasi sebagai kebijakan tanggap darurat dengan mengelola sumber daya guna sebagai bentuk penanggulangan wabah virus COVID-19 ini (Muhyiddin, 2020). Oleh karena itu, langkah yang diambil pemerintah adalah pembuatan kebijakan yang terfokus untuk mengatasi penyebaran COVID-19. Seperti selama pandemi, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hingga Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Komara et al., 2020). Laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) menunjukkan COVID-19 secara aktif turut mengancam krisis ekonomi global yang dapat ditandai dengan jatuhnya tingkat ekonomi masyarakat. OECD juga memperkirakan bahaya situasi ini jika terjadi secara berkepanjangan (Azizah et al., 2020).

Praktisnya, setelah melewati PSBB hingga PPKM, penerapan kehidupan normal yang baru (*new normal*) atau pelonggaran PSBB mulai di implementasikan pemerintah sebagai suatu kebijakan baru dengan berbagai pertimbangan. Hal ini juga bukan tugas yang mudah bagi pemerintah untuk meramu strategi yang tepat dalam dua hal yang sangat bertentangan. Di satu sisi, pemerintah harus berupaya menyelamatkan nyawa dengan karantina ketat. Namun disisi lain, pemerintah juga harus memprioritaskan untuk menyelamatkan perekonomian yang kian hari melemah akibat guncangan COVID-19 (Modjo, 2020). Maka dari itu, ketidakpastian situasi karena adanya pandemi COVID-19 ini dirasa dapat menjadi tantangan dan peluang untuk para UMKM di Sidoarjo.

Berbicara mengenai tantangan dan peluang untuk UMKM Sidoarjo. Sebagai “kota UMKM Indonesia”, masih banyak kesulitan yang dirasakan oleh para pelaku UMKM di Sidoarjo. Seperti yang tertulis pada renstra (rencana strategis) Dinas Koperasi dan UKM Sidoarjo tahun 2021-2026, yang menjadi tantangan dalam pemberdayaan UMKM di Sidoarjo, diantaranya adalah : 1) Pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam akses permodalan dan pemasaran; 2) Perlu bimbingan mengenai daya tahan berusaha kepada pelaku UMKM agar menciptakan UMKM yang mandiri; 3) Kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang standarisasi produk; 4) Pelaku UMKM merasa kesulitan karena masuknya produksi dari luar dengan daya saing yang tinggi (Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 2021). Tidak hanya itu, persoalan intensitas konsumen yang berkurang karena adanya kebijakan pembatasan kegiatan sehingga konsumen tidak banyak melakukan kegiatan di luar rumah, serta lebih memilih menggunakan teknologi digital atau sistem *online* dapat menjadi tantangan untuk para UMKM di Sidoarjo. Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dimuat media detikNews pada gambar berikut.

Gambar 1.3 Potret Keluh Kesah Pelaku UMKM Sidoarjo



Intako yang sepi, tidak ada pembeli (Foto: Suparno)

Sidoarjo - PPKM memberi dampak signifikan bagi dunia usaha. Salah satunya adalah pelaku UMKM di Sidoarjo yang berharap PPKM tidak diperpanjang.

Ketua Industri Tas dan Koper (Intako) Syaroni Arif mengatakan sejak PPKM diberlakukan, semua pengusaha yang tergabung dalam koperasi Intako sangat terdampak. Selama PPKM level 4 tidak ada pembeli yang datang ke perajin kulit di daerah Tanggulangin Sidoarjo tersebut.

"Bahkan selama dua bulan, mulai Juli dan Agustus kami tidak bisa membayar karyawan koperasi Intako," kata Syaroni di Kantornya, Senin (9/8/2021).

Syaroni mengatajkan salah satu penyebab tak adanya pembeli adalah penyekatan yang dilakukan saat PPKM. Banyaknya penyekatan membuat tidak ada pembeli datang ke lokasi perajin kulit di Tanggulangin. Hingga saat ini pihaknya sangat kesulitan untuk membayar angsuran bank.

Baca juga:

Pemilik Parkir di Terminal Bungurasih Minta PPKM Tak Diperpanjang

"Janggankan angsuran, bunganya saja tidak kuat bayar. Kami berharap pihak Pemkab Sidoarjo sudi memberikan solusinya," jelas Syaroni.

Kemarin ada beberapa pengusaha UMKM di Tanggulangin ini merasa berduka, bahkan ada beberapa pengusaha yang mengibarkan bendera putih. Mereka terpaksa melakukan itu karena hampir semua pengusaha UMKM di Tanggulangin ini bangkrut atau kolaps.

"Dengan gerakan itu bukan berarti pengusaha UMKM di Tanggulangin menolak PPKM. Yang kami harapkan Pemkab Sidoarjo harus memberikan solusinya, bagaimana cara semua UMKM ini tidak bangkrut," tandas Syaroni.

Keluh juga disampaikan oleh Lutfi, salah satu perajin kulit di Tanggulangin. Lutfi mengatakan jika PPKM diperpanjang, maka itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi masyarakat pelaku UMKM di Tanggulangin Sidoarjo.

Baca juga:

Pakar Bencana Sarankan PPKM Level 4 Diperpanjang, tapi Dilonggarkan

"Banyak masyarakat susah akibat pandemi, tapi juga beri ruang masyarakat untuk berkreasi dan berimprovisasi dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga," kata Lutfi.

Penerapan penekanannya adalah bagaimana semua instrumen masyarakat konsisten dengan proses yang sudah pemerintah sampaikan. Dengan adanya penyekatan jalan berdampak tidak ada pembeli yang datang ke lokasi kerajinan kulit di Sidoarjo,

"Sejak PPKM Darurat berlangsung, orang enggan bepergian, sehingga masyarakat Tanggulangin perajin kulit tidak ada pembeli, bila ini diteruskan bisa bikin bangkrut," tandas Lutfi.

(iwd/iwd)

Sumber : Suparno-detikNews (2021)

Berdasarkan informasi di atas, dapat dikatakan permasalahan tersebut menjadi tantangan bagi pelaku UMKM. Kendala yang dirasakan pelaku UMKM atas pandemi ini sangat nyata terhadap aspek penjualan, terutama omset yang menurun karena adanya pandemi COVID-19 dan rendahnya pemasaran produk.

Bahkan, pelaku UMKM melaporkan adanya pungutan liar (pungli) terkait dengan pengurusan perizinan ditengah susahny pemutaran ekonomi saat ini (Antara, 2021). Sedangkan, secara umum, UMKM itu menggantungkan usahanya pada modal yang sering terjebak dengan keterikatan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal.

Disisi lain, peluang yang dimiliki para UMKM Sidoarjo karena adanya pandemi COVID-19 adalah digitalisasi UMKM. Mengingat semakin berkembangnya zaman, maka pelaku UMKM juga harus dapat menyesuaikan dengan sistem pemasaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seperti halnya, pemanfaatan media sosial dan akun jejaring sosial di internet (Hesti et al., 2021). Sebelum adanya pandemi, tingkat digitalisasi pelaku UMKM tergolong rendah. Sedangkan dengan keadaan pandemi saat ini yang mengharuskan semua serba *online*, maka hal ini tentu menjadi peluang para pelaku UMKM untuk berinovasi dan bertransformasi ke *digital marketing* (Arianto, 2020). Namun, karena banyak pelaku UMKM yang juga belum mendalami ilmu digitalisasi, sehingga perlu ada fasilitas, sarana dan prasarana dari pemerintah dalam upaya optimalisasi UMKM (Yuwana, 2020).

Berkaitan dengan upaya optimalisasi UMKM yang dilakukan pemerintah, H. Ahmad Muhdlor Ali, S.I.P atau kerap dipanggil Gus Muhdlor selaku Bupati Sidoarjo dengan wakilnya yaitu H. Subandi, S.H pada periode 2021-2026 memiliki *political vision* yang disusun pada rencana strategis (renstra) dalam jangka lima tahun kedepan. Renstra ini dibuat pada Forum Konsultasi Publik (FKP) tanggal 31 Maret 2021 di Fave Hotel Surabaya. Dalam FKP tersebut juga tercantum bahwa

pertumbuhan ekonomi Sidoarjo pada tahun 2016-2019 secara stabil meningkat, namun pandemi COVID-19 berdampak paling tinggi hingga membuat fluktuasi pada pertumbuhan ekonomi Sidoarjo. Hal ini dikarenakan struktur ekonomi Sidoarjo bertumpu pada sektor industri, perdagangan dan UMKM (Pemerintah Sidoarjo, 2021). Oleh karena itu, *political vision* yang dimiliki Gus Mudhor dan Subandi tersebut berupa visi, misi, tujuan, strategi pembangunan, dan arah kebijakan rencana pembangunan Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026, serta program-program kerja yang diusung dalam periodenya.

Visi tersebut berbunyi “terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Dalam mencapai visi tersebut terdapat 5 misi, diantaranya adalah *pertama*, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha, misi ini bertujuan untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung kemudahan berusaha. *Kedua*, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis usaha mikro, koperasi, pertanian, perikanan, sektor jasa dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan, misi ini bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui percepatan industri dan perdagangan serta mendorong potensi lokal melalui pengembangan usaha mikro, koperasi, pertanian dan perikanan, serta terciptanya lapangan kerja sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,

misi ini bertujuan untuk peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi sosial yang berkeadilan dan terfokus pada prinsip pembangunan berkelanjutan. *Keempat*, membangun SDM unggul dan berkarakter melalui peningkatan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan serta lebutuhan dasar lainnya, misi ini bertujuan untuk terwujudnya pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata serta terpenuhinya kebutuhan dasar lainnya. *Kelima*, mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga, tujuan dari misi ini adalah untuk penguatan karakter masyarakat melalui internalisasi nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan untuk menciptakan ketertiban, kerukunan dan ketentraman dalam bermasyarakat. Setelah visi, misi dan tujuan, maka untuk mewujudkan strategi pembangunan, terdapat arah kebijakan rencana pembangunan Sidoarjo periode 2021-2026 yang dapat menjadi sebuah pedoman dan dasar rencana agar lebih bersinergi dan berkesinambungan sebagaimana digambarkan pada skema berikut.

Gambar 1.4 Skema Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Sidoarjo
Tahun 2021-2026



Sumber : Pemerintah Sidoarjo (2021)

Dari skema di atas, pada tahun 2021-2022 kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya mengarahkan pada pemulihan ekonomi dan reformasi sosial untuk menjamin kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi masyarakat mengingat aspek ekonomi dampak COVID-19 ini mengalami fluktuasi drastis. Oleh karena itu, sebagai upaya pencapaian implementasi arah kebijakan rencana pembangunan tersebut, terdapat program kerja yang telah disusun oleh Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021-2026 sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 1.5 Program Kerja Bupati-Wakil Bupati Sidoarjo Tahun 2021-2026



Sumber : Pemerintah Sidoarjo (2021)

Berdasarkan gambar di atas, terdapat 17 (tujuh belas) program kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo periode 2021-2026 tersebut. Ini merupakan bentuk komitmen pembangunan dari pemerintah atau dapat dikatakan *political will* sebagai upaya pencapaian *political vision* tersebut. Dari ketujuh belas program

kerja tersebut, ada empat program yang diarahkan untuk UMKM, diantaranya adalah pembukaan 100.000 lapangan kerja sebagai upaya pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19, bantuan permodalan 5-50 juta rupiah untuk kelompok usaha mikro perempuan, renovasi 2.000 warung rakyat, dan membawa 20.000 UMKM naik level. Maka, *political will* pemerintah dinilai sangat penting, baik yang ada pada tingkat departemen maupun daerah, agar pemberdayaan tidak hanya sekedar menjadi retorika ataupun *lips service*, namun apa yang dikatakan benar-benar dapat diwujudkan serta didukung dengan pembiayaan yang memadai. Hal ini juga mengingat keberadaan UMKM sangat penting dipertahankan guna membantu mengatasi berbagai masalah-masalah ekonomi dan sosial (Sukidjo, 2012). Oleh karena itu, analisis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM melalui pendekatan *political will* diperlukan karena akan menghasilkan nilai yang positif terhadap kinerja pemerintah.

Sebagaimana pada kasus negara Singapura yang pernah menjadi negara yang tingkat korupsinya tertinggi, hingga masyarakat Singapura menganggap bahwa korupsi adalah cara untuk hidup. Namun, dengan adanya *political will*, Singapura mampu mengubah perspektif tersebut dan menyandang sebagai salah satu negara terbersih dari korupsi di dunia (Ankamah & Manzoor E Khoda, 2018). Selain kasus tersebut, adapun Pemerintah Norwegia yang berupaya dalam penanggulangan pandemi virus COVID-19. Didapatkan fakta bahwa keberhasilan Norwegia daripada negara-negara lain dikarenakan Norwegia mempunyai kerjasama yang baik melalui visi dan misinya untuk penanganan dan pengendalian pandemi

tersebut. Selain itu, pengaruh politisi yang kompeten dan kebersinergian masyarakat yang memiliki legitimasi terhadap birokrasi yang handal dan profesional sehingga Pemerintah Norwegia berhasil mengendalikan pandemi lebih cepat (Christensen & Lægreid, 2020). Maka dapat disimpulkan, jika *political vision* pemerintah dijalankan dengan baik, maka *political will* akan semakin nyata dirasakan oleh masyarakat.

Definisi *political will* atau kemauan politik dapat dimaknai sebagai "niatan pimpinan" atau "komitmen pemerintah" untuk melakukan hal-hal yang diperlukan untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang (Post et al., 2010). Brinkerhoff (2010) dalam Fauzy (2015) memberikan pengertian secara teoritis, bahwa *political will* merupakan kesediaan dan komitmen pemimpin politik dalam aksi atau tindakan yang berguna untuk menggapai seperangkat tujuan dan diiringi dengan keberlanjutan usaha. *Political will* pemerintah juga masuk dalam parameter *welfare state* sesuai dengan konsep yang dianut oleh Indonesia, yang berbunyi bahwa kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam kebijakan (Rachim, 2018).

Menurut *Civil Society Organizations* (CSO) dalam Ariyani & Nugroho (2017) berpendapat terkait *political will*, bahwa pemerintahan yang baik itu perlu kekuatan politik, efektivitas pemerintah dan keterlibatan aktif dari negara serta organisasi sosial masyarakat. Sehingga, implikasinya adalah kebijakan atau program yang dimiliki pemerintah tentu melibatkan publik, karena dasar dari pemerintah adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun, fakta yang terjadi adalah banyak kebijakan-kebijakan yang terimplementasi tanpa adanya *political*

will dari pemerintah. Bahkan meskipun ada, peran pemerintah belum dirasa cukup efektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, studi tentang *political will* pemerintah untuk menjalankan kebijakan menjadi penting dalam agenda kepemimpinan politik karena jabatan politik di pemerintahan dipandang sebagai sarana yang dapat mendukung untuk kepentingan kelompok. Namun, hasil dari seberapa besar *political will* memiliki kesenjangan karena tentu penerapan setiap politisi sangat beragam.

Dalam penelitian ini, *political will* bukan berarti melakukan klaim perbanyak UMKM untuk mengeruk keuntungan material, namun apapun yang dikehendaki benar-benar dari niat dan tekad yang tulus untuk menjadikan UMKM lebih baik dan optimal. *Political will* ini sangat penting, terlebih di tengah pandemi COVID-19 yang menyerang berbagai sektor, terutama pada perekonomian masyarakat menengah kebawah untuk *survive* dan berinovasi baik hanya demi mempertahankan usahanya, yang sedang merintis usahanya, atau untuk meningkatkan kualitas usahanya. Tanpa *political will* itu apapun yang akan direncanakan semuanya tidak akan membawa hasil yang memuaskan. Tentunya, membual tanpa hasil nyata adalah menjadikan seseorang tersebut penipu. Berangkat dari realitas di atas, penulis ingin meneliti *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang tidak hanya menggunakan data pencetusan program namun juga melihat bagaimana dan seperti apa hasil dari *political will* tersebut terhadap upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : **“Bagaimana *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo?”**

1.3 Tujuan Penulisan

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : **untuk mengetahui seberapa besar *political will* Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo.**

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat bermanfaat untuk inspirasi dan acuan oleh peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta untuk menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan program studi Administrasi Publik.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo

Diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan sebagai bahan masukan, kritik dan saran yang membangun serta evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Sidoarjo agar semakin unggul dalam keberhasilan implementasi program dan kebijakannya sebagai upaya optimalisasi UMKM di Sidoarjo.

c. Bagi UMKM Sidoarjo

Diharapkan dapat memberikan inspirasi dan saran yang membangun sebagai wujud turut serta membantu pertumbuhan ekonomi, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk negara, terutama di tengah pandemi yang harus *survive* dalam rangka upaya optimalisasi UMKM.

d. Bagi Penulis

Penulis dapat memperdalam pengetahuan dan wawasan mengenai *political will* dalam upaya optimalisasi UMKM dalam perspektif Administrasi Publik.